

BAB I

PENDAHULUAN

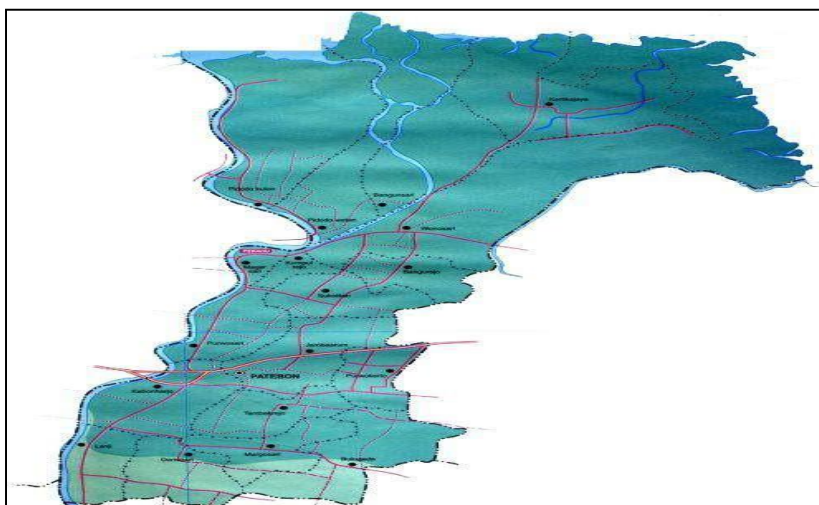
A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Patebon Tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Patebon kepada masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kendal

Penyusunan laporan kinerja diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target yang ditetapkan, pengukuran kinerja dan Evaluasi analisa kinerja untuk setiap strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud (Termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya)

Sehubungan dengan ketentuan tersebut maka Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal sebagai salah satu Instansi atau Organisasi Perangkat Daerah pada Kabupaten Kendal juga mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu bentuk petanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan visi dan misi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

Profil Kecamatan



Kecamatan Patebon merupakan satu dari 20 Kecamatan di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, dengan wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Laut Jawa, sebelah Selatan berbatasan

dengan Kecamatan Pegandon, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cepiring dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kota Kendal, dengan ketinggian tanah 7 sampai dengan 13 meter diatas permukaan laut.

Luas wilayah Kecamatan Patebon mencapai 44,30 Km² dengan sebagian besar wilayahnya digunakan sebagai lahan bukan pertanian yang berupa rumah/bangunan, hutan negara, rawa-rawa dan lainnya yaitu mencapai 16,62 Km² (37,51%), selebihnya untuk lahan sawah sebesar 13,84 Km² (31,23%) dan lahan bukan sawah sebesar 13,85 Km² (31,26%).

Apabila dilihat menurut luas wilayah desa, desa terluas di Kecamatan Patebon adalah Desa Wonosari dengan luas wilayah sebesar 8,04 Km² (18,15 persen dari luas wilayah Kecamatan Patebon), sementara desa dengan luas terkecil adalah Desa Magersari dengan luas hanya sebesar 0,30 Km² (0,68 persen dari luas wilayah Kecamatan Patebon). Menurut jarak kantor desa ke ibu kota Kecamatan Patebon, Desa Pidodokulon merupakan desa terjauh dengan jarak mencapai 9,20 Km sedangkan desa terdekat adalah Desa Jambearum yang merupakan desa tempat ibu kota Kecamatan Patebon.

B. Mandat Kerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

B.1. Mandat Kinerja

Mandat kerja merupakan landasan utama dalam menyusun dan melaporkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan memuat sasaran strategis yang selaras pada pencapaian visi misi dalam sasaran pembangunan untuk mencapai target kinerja pada Kecamatan Patebon dalam upaya peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2024. Dengan adanya mandat kerja yang jelas diharapkan dapat terlaksananya program dan kegiatan yang berorientasi kepada hasil yang dapat di pertanggungjawabkan bagi kesejahteraan sumber daya aparatur.

B.2. Peta Proses Bisnis

Untuk mendukung kinerja yang baik diperlukan alat pendukung yang dapat menjadi tolak ukur kinerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan penyusunan Peta Proses Bisnis pada Kantor Kecamatan Patebon dan ini menjadi dasar penempatan

personil.Penyusunan Probis pada Kantor Kecamatan Patebon tersebut menjadi acuan bagi setiap Kepala Seksi dan Kepala sub bagian untuk mengetahui peta proses bisnis sesuai dengan visi,misi dan tujuan yang sudah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Peta Proses Bisnis Kantor Kecamatan Patebon adalah sebagai berikut :

1. Mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif,efisien,akuntabel,terintegrasi dan trasnparan
2. Mudah melaksanakan tugas baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai Visi,Misi dan Tujuan.
3. Memiliki pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai Visi,misi dan Tujuan.
4. Mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif,efisien,akuntabel,terintegrasi dan trasnparan
5. Mudah melaksanakan tugas baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai Visi,Misi dan Tujuan.
6. Memiliki pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai Visi,misi dan Tujuan.

Tabel 1.1
Peta Proses Bisnis Kecamatan Patebon

Proses Bisnis Level 0 (Program)	Proses Bisnis Level 1 (Kegiatan)	Proses Bisnis Level 2 (Sub Kegiatan)	Tahap Aktivitas
01. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	01.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	01.1.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
		01.1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Penyusunan rencana kegiatan pemerintahan dalam kegiatan sosialisasi,Kapasitas SDM,Pelayanan Publik

	01.2 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	01.2.1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Melaksanakan koordinasi bersama berkaitan sarana prasarana yang diperlukan untuk menunjang kegiatan baik dari segi pengadaan sarana dan prasarana,efisiensi anggaran juga pemeliharaan sarana prasarana yang diperluakn
	01.3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	01.3.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Permohonan berkas pengajuan IMB untuk luas maksimum 100 M2
			Penelitian kelengkapan berkas, verifikasi pengajuan ijin,agendapermo honanijin dan pemberitahuan pemeriksaanlokasi
			Pemeriksaan Lokasi Perijinan
			Penyusunan BA pemeriksaan lokasi dan pembuatan SK Perijinan
			Penandatanganan SK Perijinan
02. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	02.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	02.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Melaksanakan Musrenbang
			Merekaphasilmusren bangdes sebagai bahan tingkat kecamatan
			Mendata program kegiatan sektoral yang diusulk an lewat lintas sektoral
			Menginput hasil musrenbangdesda

			nprogram kegiatan sektoral lewat aplikasi SIPD
			Menelitirekapitulasi hasil musrenbangdes untuk diajukankepada camat
			Menandatanganirek apitulasi hasil musrenbangdes dan pendataanprograms ektoral sebagai bahan musrenbangcam
			Mempersiapkanadm inistrasi untuk pelaksanaan musrenbangcam
			Pelaksanaanmusre nbangcam
			Merekap hasil penentuan skala prioritas perencanaanpem bangunan kecamatan
			Meneliti hasil rekapitulasi skalaprioritasper encanaan pembangunan tingkat kecamatan
			Menandatanganirek apitulasi sebagai bahan musrenbangkab
			Mengarsipdanmengi rimkan hasil musrenbangcam ke Bapertlitbang
		02.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Penyusunan rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat
			Menyiapkan administrasi persiapankegiatan pemberdayaanmasy arakat

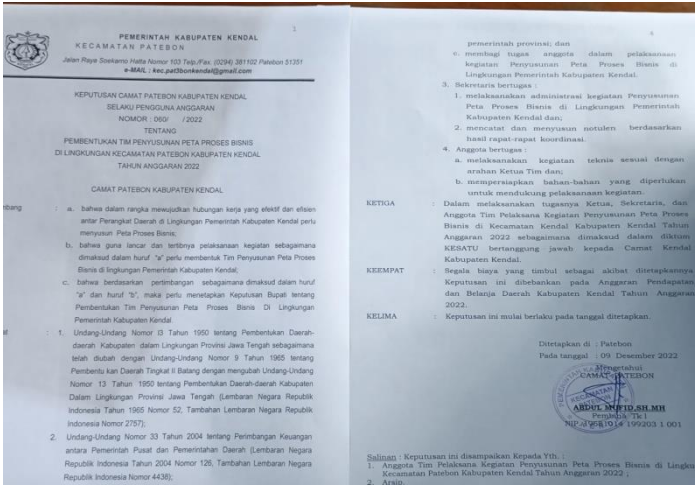
			Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai rencana kegiatan
			Membuat laporan kegiatan untuk ditandatangani oleh atasan
			Menandatangani hasil laporan kegiatan
			Melaporkan hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat kepada instansi terkait
03 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	03.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	03.1.1 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
		04.1.2 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Melakukan koordinasi bersama tokoh tokoh agama juga tokoh masyarakat juga pemerintatan (stakeholder) untuk membahasa isu – isu atau permasalahan berkaitan kerukunan agama dengan mencari solusi permasalahannya.
		03.1.3 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Melaksanakan koordinasi dan menyusun kegiatan/agenda kegiatan
04 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	04.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	04.1.1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	

		04.1.2 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Membuat jadwal kegiatan pembinaan untuk penyusunan RAPBDES dan PERDES
			Menyiapkan jadwal dan undangan pembinaan
			Dikirim bagian operator kemudian diteliti oleh sekretaris Camat dan setelah selesai kemudian naik ke camat kemudian di TTE
			Pelaksanaan kegiatan
			Membuat laporan kegiatan
		04.1.3 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Melakukan koordinasi bersama polsek dan koramil untuk kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum diwilayah Kecamatan Patebon
05. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	05.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	05.1.1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Menerima plafon anggaran dan pedoman penyusunan RKA/DPA
			Klarifikasi Plafond Anggaran dengan Renja OPD
			Penyusunan RKA/DPA
			Verifikasi dan Rekapitulasi RKA/DPA Kasi dan Kasubag
			Validasi RKA/DPA
			Asistensi RKA/DPA
			Menandatangani RKA/DPA
	05.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	05.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Menyipakan dokumen penggajian
			Input ke SIPD

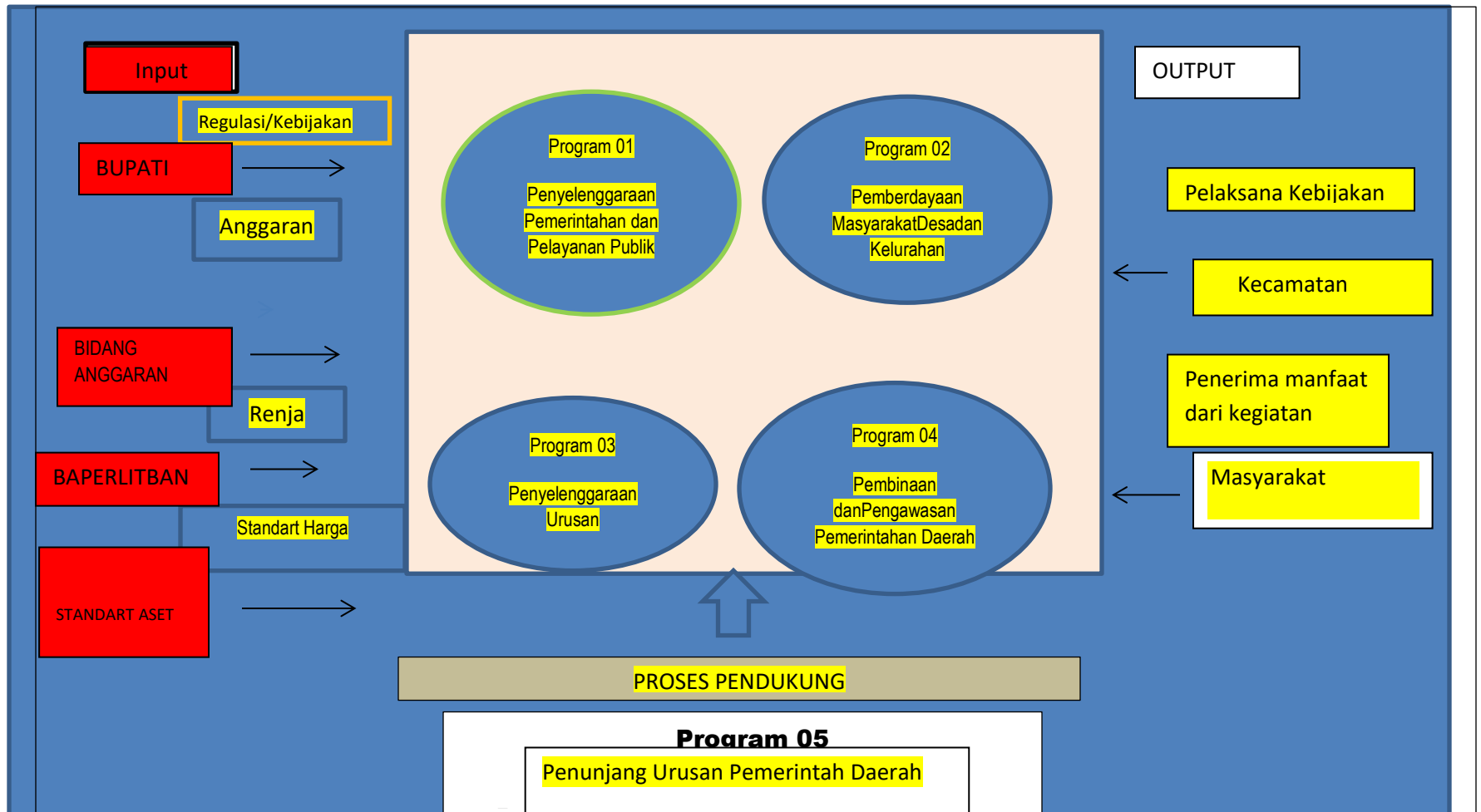
			untuk membuat SPP,SPM
			Penandatan BP,Camat,Sekcam dan PPTK
			pengiriman
		05.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
	05.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	05.3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Membuat rekap daftar barang yang akan dibeli
		05.3.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Survey harga barang minimal sesuai dengan SSH
		05.3.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Membuat surat pesanan belanja barang
		05.3.4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Membuat surat pesanan belanja barang
		05.3.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pembayaran belanja barang
		05.3.6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Menghimpun nota pembelian dan membuat laporan pertanggungjawaban
		05.3.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Menindaklanjuti surat perintah rapat koordinasi koordinasi kepada atasan
			Melaksanakan rapat koordinasi
			Melaporkan hasil rapat
			Menyusun laporan hasil rapat koordinas Dan mengirim SPJ
		05.3.7 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
	05.4	05.4.1	Merekap kebutuhan

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	pembayaran belanja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
		05.4.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Membayar belanja jasa dan menghimpun nota-nota pembayarannya
		05.4.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meneruskan laporan yang sudah diparaf untuk ditanda tangani pengguna anggaran
	05.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	05.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Merekap kebutuhan pembayaran belanja pemeliharaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dan menghimpun nota-nota pembayarannya
		05.6.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Membayar belanja pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dan menghimpun nota-nota pembayarannya

Gambar 1.2
SK Peta Bisnis



Gambar 1.3
Peta Probis Kecamatan Patebon



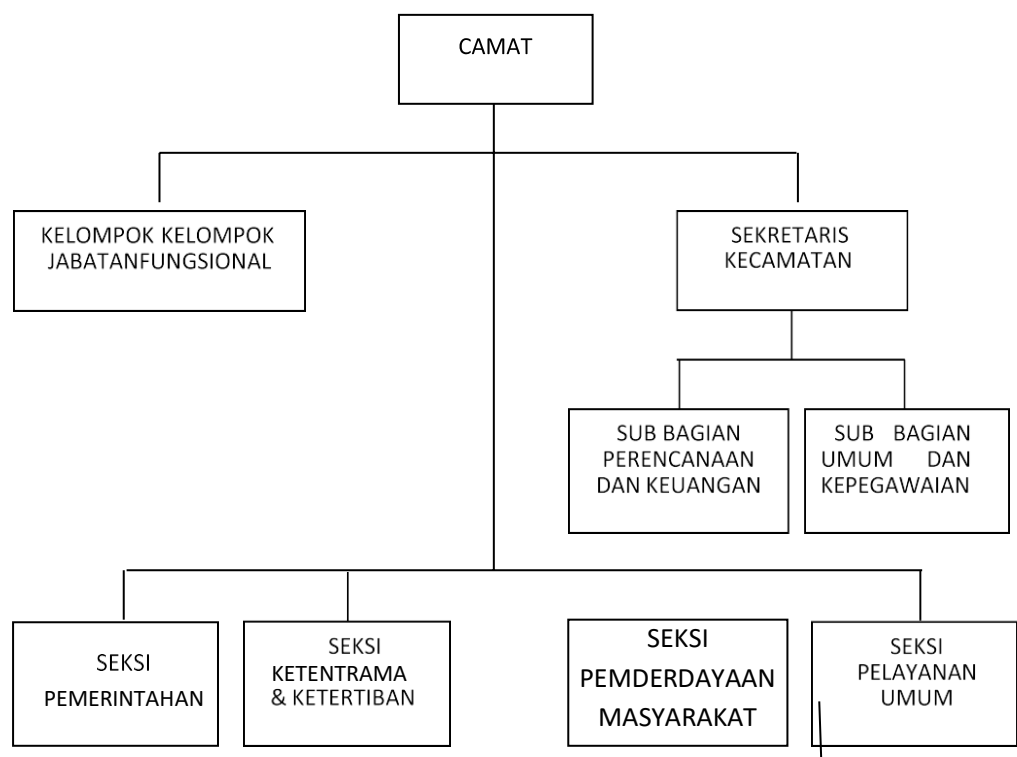
B.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal dan Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 77 Seri D No. 28) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal. Kedudukan Kecamatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian tugas jabatan struktural dan Tata kerja pada Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Kendal, maka Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati adalah :

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah daerah Kabupaten /Kota yang ada di Kecamatan ; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Gambar 1.4

Struktur Organisasi Kecamatan Patebon



C. Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan masalah atau tantangan yang memerlukan perencanaan,pengambilan keputusan dan tindakan yang tepat karena memiliki dampak yang signifikan dalam jangka menengah atau jangka panjang dalam mencapai tujuan dalam pembangunan daerah sehingga diperlukan sumber daya yang memadai serta memerlukan kolaborasi dan komunikasi yang efektif dari stakeholder.

Berdasarkan dari analisis Isu –isu strategis yang teridentifikasi pada Kecamatan Patebon diantaranya adalah :

1. Sumber Dara Manusia yang masih terbatas baik dari segi kualitas dan kuantitas
2. Kurangnya koordinasi antar pelaksana sehingga dalam pendelegasian wewenang hasilnya kurang optimal
3. Kurangnya koordinasi antar dinas terkait dan desa sihinggal dalam mengatasi segalan permasalahan dalam biadan pemerintahan,pemberdayaan dan keamanan dan ketertiban kurang optimall
4. Tingkat Kedisiplinan yang masih rendah dari semua aparaturr
5. Keterbatasan sarana dan prasarana untuk penunjang kegiatan sehingga memperlambat dalam melaksanakan semua kegiatan

D. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran

D.1 Dukungan SDM

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya,serta melakukan kegiatan pelayanan umum Kecamatan Patebon didukung SDM sebanyak 16 pesonil yang terdiri dari 8 laki-laki 11 perempuan.Dari jumlah tesebut ada sebanyak 16 orang yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) sedangkan pegawai Non ASN berjumlah 6 orang yaitu 3 orang tenaga Linmas,1 orang tenaga administrasi,1 orang tenaga supir dan 1 orang tenaga kebersihan.

Secara rinci data sumber daya aparatur pegawai Kecamatan Patebon dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Kecamatan Patebon

NO	NAMA	L/P	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	2	3	4	5
1	Abdul Mufid,SH.M.M	L	Pembina Tk 1 (IV/b)	Camat Patebon
2	Muhtasib,S.Sos.M.Si	L	Pembina IV/a)	Sekretaris Camat
3	Hatnolo Ardi	L	Pembina (IV/a)	Kasie Keamanan & Ketertiban
4	Suwiryono,S.Sos	L	Penata Tk 1 (3/d)	Kasie Pelayanan Umum
5	Sri Subandini,S.Pt	P	Penata Tk l(3/d)	Kasie Pemerintahan
6	Prito Widyorini,SP	P	Penata Tk l(3/d)	Kasie PMD
7	Sri Lestari,SE	P	Penata (3/c)	Kasubag UMPEG dan Kepegawaian
8	Prita Damayanti,S.AP	P	Penata (3/c)	Staf
9	S Mahira Prabandaru	L	Penata Muda (3/a)	Staf
10	Edhi Susanto	L	Pengatur Tk 1 (2d)	Staf
11	Hernadi Budiyanto	L	Pengatur Tk 1 (2/d)	Staf
12	Etyk Sudyarti	P	Pengatur Tk 1 (2/d)	Staf
13	Syah Ana,A.Md	P	Pengatur Tk 1 (2/d)	Staf
14	Subur	L	Pengatur (2/c)	Staf
15	Bertha Intar Lufilla,A.Md	P	Pengatur (2/c)	Staf
16	Agung Oktavian	L	Non PNS	
17	Muhamad Maftukhin	L	Non PNS	
18	Supardi	L	Non PNS	

19	Akhmad Solikin	L	Non PNS	
20	Sugiyanto	L	Non PNS	
21	Bagus Firman Rusadi	L	Non PNS	

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Berdasar Golongan

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	GOLONGAN			
			IV	III	II	I
1	PEGAWAI NEGERI	15	3	6	6	0
	TOTAL	15	3	6	6	0

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Kecamatan Patebon Berdasarkan Pendidikan

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai	Pendidikan						
			S3	S2	S1	D 3	SM A	SM P	SD
1	Pegawai Negeri	16	0	2	7	2	4	1	0
2	Tenaga Penunjang	6							
	TOTAL	21	0	2	8	2	8	1	0

D.2. Sarana Prasarana

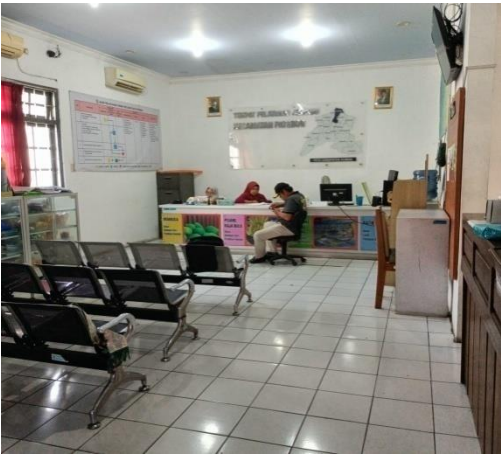
Adapun sarana dan prasarana yang mendukung untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki Kecamatan Patebon adalah seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.5
Sarana dan Prasarana Kecamatan Patebon

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi
Sarana				
1	Gedung Kantor (Sekretarian dan Pelayanan)	buah	1	Baik/Rusak
2	Rumah Dinas Camat	buah	1	Rusak
3	Gedung Aula /Pertemuan	buah	1	Baik/Rusak
4	Mushola	Buah	1	baik
Prasarana				
1	Meja Kursi Tamu	set	2	Baik
2	Meja Rapat	buah	2	Baik
3	Meja Kerja Pejabat eselen lll/Camat	buah	1	Baik
4	Meja Kerja Pejabat eselen lll/Sekcam	buah	2	Baik
5	Meja Pelayanan	Buah	3	Baik
6	Kursi Lipat	buah	100	Baik/Rusak
7	Kursi Tunggu	buah	5	Baik/Rusak
7	Kursi Kerja	buah	34	Rusak
8	Lemari Kayu	buah	4	Baik
9	Lemari Kaca	buah	5	Baik
10	Lemari Besi	Buah	8	Baik/Rusak
11	Filling Cabinet	Buah	24	Baik/Rusak
12	Air kondisioner split	buah	10	Baik/Rusak
13	Kipasangin	buah	5	Baik/Rusak
14	Komputer server	buah	5	Rusak
15	Komputer PC	buah	1	Baik
16	Laptop	buah	12	Baik/Rusak
17	UPS power	buah	1	Baik
18	Printer tinta	buah	5	Baik/Rusak
19	Printer, scan, copy	buah	3	Baik/Rusak
20	Soundsytem	Buah	2	Baik/Rusak
21	TV	Buah	4	Baik
22	Layar Proyektor	buah	2	Baik
23	Kamera	buah	2	Baik/Rusak
24	Mesin Ketik Elektrik	buah	1	Baik
25	Megaphohe	buah	2	Baik
26	Faximille	buah	2	Rusak

27	Lambang Garuda	buah	4	Baik
28	Papan Nama Instansi	Buah	1	Baik
29	Papan Pengumuman	Buah	1	Baik
30	Papan Monografi dll	Unit	1	Baik
Kendaraan Dinas				
1	Roda Empat	buah	2	Baik/Rusak
2	Roda Dua	buah	17	Baik/Rusak

Gambar 1.5
Gedung Pelayanan



Gambar
Gedung Aula/Pertemuan

Gambar
Gedung Rumah Dinas



Gambar
Gedung Mushola



D.3. Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2024 alokasi anggaran Pemerintah Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal Sebesar Rp 2.665.694.385 dana tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Kendal yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan yang telah direncanakan ditahun 2024.

Adapun rincian anggaran pada tahun 2024 ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu :

Tabel 1.6
Alokasi anggaran Kecamatan Patebon Tahun 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN (RP)
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.417.596.385
2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	132.214.000
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	56.920.000
4	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	84.351.756
5	Pembinaan dan Pengawsan Pemerintahan Desa	55.114.000
Jumlah Total		2.665.694.385

Dari anggaran terssebut sebagai dasar penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) pada Kantor Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal mengacu kepada Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di atas kepada masyarakat maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan tanggung jawab yang kesemuanya dituangkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAK)

E. Sistematika Penulisan

Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kinerja Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal telah menyusun Pelaporan Kinerja Instansi yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan, ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Bab III Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

Bab ini menyajikan capaian kinerja pada Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal dari tujuan/saran strategis sesuai dengan indikator kinerja sebagai pengukuran kinerja organisasi Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal. Untuk setiap kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
4. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan
5. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
6. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja

tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

7. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
 8. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan
 9. Menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya
 10. Menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja
- b. Realisasi anggaran

Pada bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Bab ini menguraikan kesimpulan secara umum atas capaian kinerja serta langkah –langkah yang dilakukan dimasa mendatang untuk meningkatkan capaian kinerja pada Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.

F. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Dalam rangka mengetahui Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kecamatan Patebon telah dilakukan Evaluasi SAKIP oleh evaluator SAKIP dari Inspektorat Kabupaten Kendal, tujuan evaluasi SAKIP adalah :

- a. Memperoleh informasi tentang Implementasi SAKIP
- b. Menilai tingkat Implementasi SAKIP
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, DAN
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Rekomendasi yang diberikan Tim Evaluator terhadap Implementasi SAKIP Kecamatan Patebon adalah sebagai berikut :

1. Camat Patebon agar melaksanakan pengawasan secara periodik atas **capaian kinerja** disetap bidang sehingga sesuai dengan tahapan target yang telah ditetapkan;

2. Memanfaatkan dialog kinerja agar semua pegawai memahami dan peduli atas hasil **pengukuran kinerja** untuk mendorong perbaikan implementasi SAKIP yang berkelanjutan
3. Guna perbaikan kriteria pada sub komponen keberadaan dokumen **pelaporan kinerja** untuk dilakukan reviu berjenjang pada saat penyusunan dokumen kinerja;
4. Guna perbaikan kriteria pada sub komponen dalam pemanfaatan **pelaporan kinerja** agar capaian kinerja dapat diketahui oleh seluruh pegawai dengan melaksanakan kegiatan rutin pembahasan capaian kinerja dan terdokumentasi ;
5. Guna perbaikan kriteria pada sub kegiatan terkait pemanfaatan implementasi SAKIP agar rekomendasi tahun sebelumnya dapat dijadikan tindak lanjut perbaikan pada **laporan kinerja** pada periode selanjutnya.
6. Guna perbaikan kriteria pada sub komponen terkait informasi pada webside beserta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Tabel 1.7
Tindak Lanjut LHE Tahun 2024

NO	REKOMENDASI	AKSI YANG DILAKSANAKAN
1	Kriteria pada sub Komponen Perencanaan Kinerja diperlukan : - pengawasan secara periodik atas capaian kinerja disetap bidang sehingga sesuai dengan tahapan target yang telah ditetapkan; - Memanfaatkan dialog kinerja agar semua pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	- Megadakan rapat staf setiap triwulan untuk melaporkan hasil kinerja pada setiap bidang serta mengevaluasi,mengindentifikasi serta mencari solusi permasalahan yang ada 
2	Kriteria pada sub Komponen Pelaporan	- Melakukan reviu secara berjenjang pada setiap program

	Kinerja diperlukan : - untuk dilakukan reviu berjenjang pada saat penyusunan dokumen kinerja - capaian kinerja dapat diketahui oleh seluruh pegawai dengan melaksanakan kegiatan rutin pembahasan capaian kinerja dan terdokumentasi	kegiatan yang sudah dilakukan dengan melihat output dan outcome nya 
3	Kriteria pada sub Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal diperlukan: - agar rekomendasi tahun sebelumnya dapat dijadikan tindak lanjut perbaikan pada laporan kinerja pada periode selanjutnya. - Agar menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan	- Mengevaluasi capaian kinerja program kegiatan yang sudah dilaksanakan kemudian mengevaluasi kegiatan tersebut sesuai dengan tingkat keberhasilan/kegagalan /penurunan dan kemudian mencari solusi permasalahan tersebut

BAB 11

PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Perencanaan kinerja merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama dalam rangka pencapaian visi dan misi dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) pada Kecamatan Patebon Tahun 2021-2026. Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Untuk memberikan arah perencanaan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Patebon melaksanakan kegiatan Visi, Misi, Tujuan, sasaran, strategi kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

A.1. Visi

Visi adalah cita-cita yang ingin diwujudkan dalam 5 tahun masa RPJMD. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kendal dalam 5 (lima) tahun mendatang untuk periode RPJMD Tahun 2021-2026 adalah “Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan”.

A.2. Misi

Misi Kecamatan Patebon adalah merupakan bagian dari misi Kabupaten Kendal, adapun misi untuk misi Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan Industri Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (start up);

- 2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0
- 3) Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif, ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tentram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan stakeholder pembangunan
- 4) Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan
- 5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

Dari misi tersebut di atas Kecamatan Patebon mengambil Misi ke-5 adalah sebagai berikut :

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan

A.3. Tujuan dan Sasaran

1) Tujuan

Sesuai dengan visi, misi, tugas dan fungsi Kecamatan Patebon, maka dirumuskan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan Patebon adalah : Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2) Sasaran Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran yang hendak dicapai Kecamatan Patebon dapat dirumuskan berdasarkan tujuan yang ada, yaitu:

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan.
- b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja

3) Indikator Sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, maka ditetapkan indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

- a. Prosentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
- b. Prosentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan
- c. Prosentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD
- d. Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani

- e. Prosentase Jumlah Desa Yang Tertib Administrasi
- 4) Program Untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah dirumuskan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026, maka Kecamatan Patebon telah menyusun program dan kegiatan tahun 2021-2026, sebagai berikut:
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- 5) Kegiatan Pada tahun 2024, kegiatan yang ingin dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Patebon adalah sebagai berikut:
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 4. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 5. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
 6. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 7. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
 8. Pelaksanaan Urusan Pemeliharaan yang Dilimpahkan kepada Camat
 9. Kordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 10 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - 11 Fasilitasi, rekondasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

Tabel 2.1
 Tujuan,Sasaran dan Rencana target Kinerja Kecamatan Patebon

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkan kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai IKM	90,28	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00
			Nilai SAKIP	69,75	70	74	75	80	80

Dari tabel 2.1 tersebut diatas dapat diketahui bahwa target indicator tujuan jangka menengah (Indikator Kinerja Utama) di Kecamatan Patebon bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta peningkatan tata kelola pemerintahan dalam perwujudan pemerintahan yang akuntabel juga pelayanan yang lebih baik dengan indicator kinerja Nilai SAKIP.

Gambar 2.1
Penyempurnaan SK Indikator Kinerja Utama



B. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan strategis dan Arah Kebijakan yang akan dicapai Kecamatan Patebon dengan mengarah pada rumusan strategi agar lebih terarah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran rencana strategis Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.

Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kecamatan Patebon dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dengan arahan strategi organisasi dirumuskan pada tabel sebagaimana berikut dibawah ini :

Tabel 2.2
Rencana Kinerja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningktkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	NILAI SAKIP	%	75
			NILAI IKM	%	93

Tabel 2.3
Strategi dan Arah kebijakan Jangka Menengah
Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026

Visi RPJMD : Kendal Handal,Unggul,Makmur dan Berkeadilan			
Misi RPJMD yang terkait :			
Visi ke 5 : <i>“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan”</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan melalui pembinaan, pengawasan, pengendalian	Meningkatkan kinerja Kecamatan dengan fokus kualitas perencanaan, penganggaran, pengelolaan asset dan meningkatkan peran desa dalam

		dan pemanfaatan SIMDA/SIPD Keuangan	pembangunan
		Meningkatkan pembangunan kualitas penatausahaan asset daerah melalui bintek pengurus barang dan pemanfaatan SIMDA BMD	
		Meningkatkan intensitas koordinasi antar dinas/instansi, UPTB/UPTD dan kelurahan di wilayah Kecamatan melalui rapat dinas/rakor	
		Peningkatan pelaksanaan kewenangan Bupati kepada Camat melalui pelaksanaan evaluasi rancangan Perdes APBDes, LPPDes serta asset Pemda dan asset Desa	
		Meningkatkan pembinaan dan koordinasi terhadap desa dalam intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pelibatan masyarakat	

		dalam Musrenbang Desa dan Kecamatan	
		Peningkatan kerukunan hidup beragama melalui pembinaan bidang keagamaan	
	2. Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan	Meningkatkan kinerja pelayanan publik melalui penilaian survey kepuasan masyarakat Meningkatkan kinerja pelayanan publik melalui penilaian survey kepuasan masyarakat	Meningkatkan kepuasan masyarakat dengan fokus meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan koordinasi keamanan, ketentraman dan perlindungan masyarakat
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas pelayanan melalui pengadaan	
		Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyusunan dan penerapan SPPsesuai SOP	
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui penyusunan dokumen Perubahan Renstra, Renja, RKA/DPA OPD yang terukur	

C. STRUKTUR DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2024

Kecamatan Patebon telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan pada Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Patebon tahun 2021-2026.Kegiatan –kegiatan

yang telah disusun dalam Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari program yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis.

Pada tahun 2024 Kecamatan Patebon melaksanakan 5 Program, 11 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari :

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan : (lampirkan angka)
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 1. Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 5. Penyediaan Barang Catakan dan Penggandaan
 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan :
 1. Penyediaan Jasa Surat menyurat
 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan :
 1. Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terdiri dari 3 kegiatan yaitu :

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan :
 - a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

- b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- 2. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dengan sub kegiatan :
 - a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
- 3. Pelaksanaan Urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang terdiri dari 1 Sub kegiatan adalah
 - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
- 3. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang** terdiri dari 1 kegiatan yaitu :
 - 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desaterdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 4. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang** terdiri dari 1 kegiatan yaitu :
 - 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum esesuai dengan Penugasa Kepala Daerah terdiri 3 Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
 - b. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
 - c. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- 5. **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** terdiri dari 1 Kegiatan yaitu :
 - 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - b. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - c. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

D. PERJANJIAN KINERJA

Kecamatan Patebon telah menyusun dokumen perjanjian kinerja pada Tahun 2024 yang telah ditanda tangani Camat dan Bupati Kendal sebaga suatu DokumenPerjanjian Kinerja berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Patebon .Perjanjian Kinerja tersebut mencantumkan sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Patebon beserta target kinerja dan alokasi anggaran tahun 2024

Selanjutnya Rencana Kinerja Tahun 2024 dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Patebon tahun 2024 sebagai beikut .:

Tabel 2.3
Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	MeningkatnyaKualitas Pelayanan Publik Kecamatan	NilaiIndeksKepuasanMasyarakat	Score	90
	ProgramPenyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	86 %	100
	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase aspirasi masyarakat yang di akomodir dalamRKPD	95 %	50
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	90 %	80
	ProgramPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	90 %	60
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan		
	ProgramPenunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya layanan umum,kepegawaian dan keuangan PerangkatDaerah	80 %	100

Sesuai dengan Tabel Perjanjian Kineerja Tahun 2024, maka untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana tersebut diatas diwujudkan dalam 5 Program dengan dukungan anggaran sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
	Program Penyelenggaraan	Persentase pelaksanaan	86 %	100	Rp. 132.214.000

	Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pelimpahan kewenangan kecamatan			
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentas easpirasi masyarakat yang di akomodir dalamRKPD	95 %	50	Rp. 56.920.000
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang di tangani	90 %	80	Rp. 3.850.000
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	90 %	60	Rp 55.114.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya layanan umum,kepegawai an dan keuangan Perangkat Daerah	80 %	100	Rp. 2.417.596.385

E. INSTRUMEN PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja di Kecamatan Patebon diperlukan kapasitas sumber daya aparatur dengan menggunakan aplikasi – aplikasi untuk dapat memonitoring dan mengevaluasi capaian kinerja.

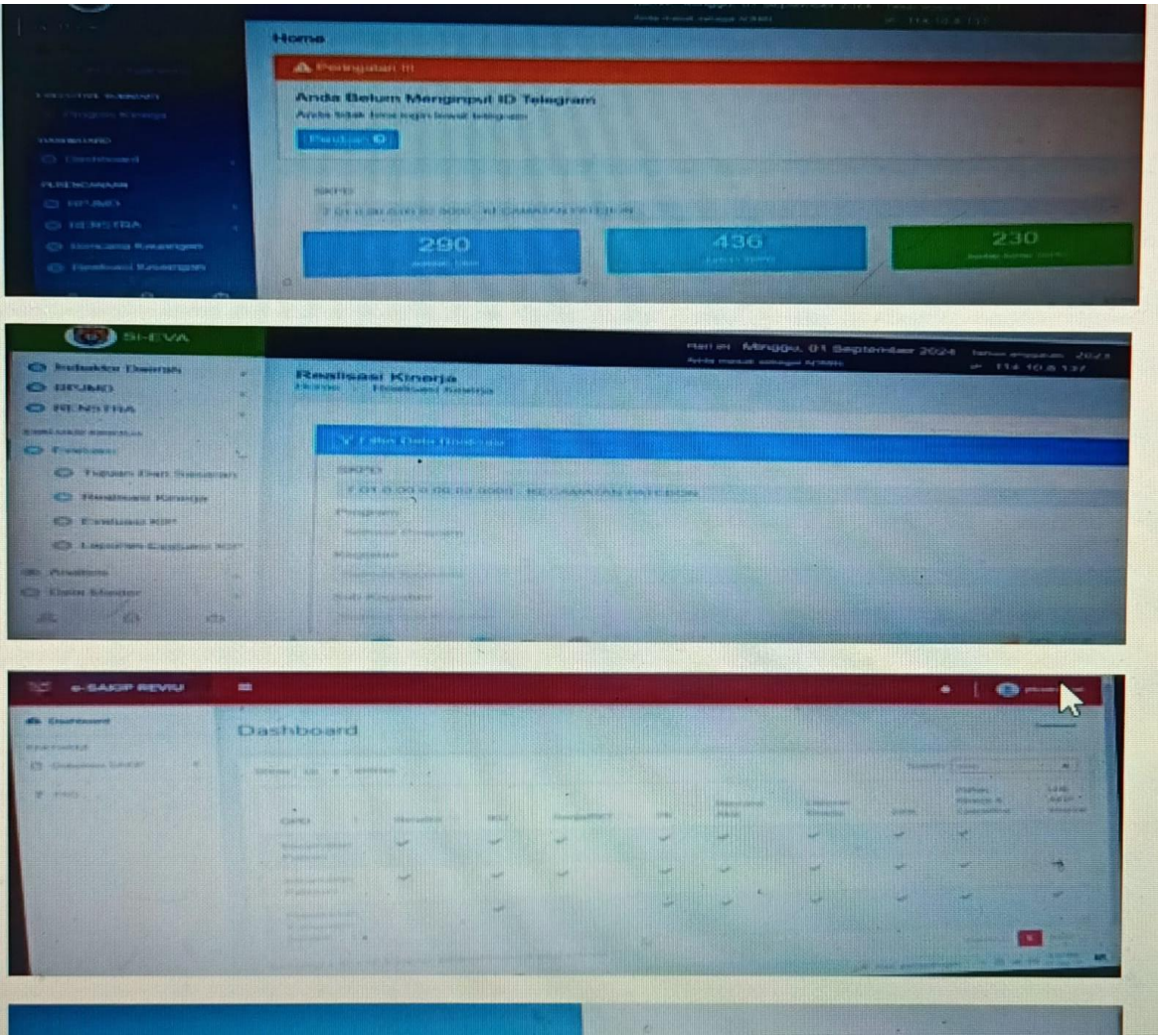
Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) di Kecamatan Patebon adalah sebagai berikut :

- <https://sakip-kendal.simda.net/>,<https://simpok.kendalkab.go.id/> dan <http://www.esr.menpan.go.id>;

Yang mengintegrasikan perencanaan, anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan,

- Website Kecamatan Patebon: <https://kec.patebon.kendalkab.go.id/> adalah instrumen yang mendukung upaya keterbukaan publik melalui berbagai informasi dan laporan yang disajikan kepada masyarakat.

Gambar 2.2
Aplikasi Simpok,Sieva dan Sakip



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capain Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Progres kinerja yang dilakukan adalah dengan menganalisi pengukuran kinerjanya. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingka target pada setiap indikatornya dengan realisasinya sehingga dapat diketahui selisihnya.Kemudian dengan melihat selisih kinerja dapat dilakukan evaluasi untuk mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	$\geq 100 \%$	Sangat Baik
2	85 – 100 %	Baik
3	65 – 84,99 %	Cukup
4	50 – 64,99 %	Kurang
5	$\leq 50 \%$	Sangat Kurang

3.1. Capaian Kinerja Kecamatan Patebon Tahin 2024

Capaian kinerja Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal Tahun 2024 atas Tujuan dan Sasaran daerah yang termuat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 dapat disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Tabel Capaian Kinerja
Capaian Kinerja tahun 2024

N o	Tujuan	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	%	Target Akhir RPJMD
1	Meningkatkan Informasi birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat	%	93	84,67	80	95
			Nilai SAKIP Kecamatan	%	75	70,05	70	80

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Program dan Anggaran Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Targ et	Realisasi	Capaian	Kateg ori	Sum ber Data
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	93				
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan Kecamatan		132.214.000	129.511.552	97,96	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam RKPD		56.920.000	55.485.000	97,48	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani		3.850.000	3.850.000	100	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu		55.114.000	51.412.500	93,28	
		Nilai SAKIP Kecamatan	75				
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya layanan umum,kepegawaian dan keuangan PerangkatDaerah		2.417.596.385	2.267.439.838	93,79	

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Capaian Kinerja pada Kecamatan Patebon apabila dilihat dari indikator IKM (Indek Kepuasan Masyarakat) tercapai score 84,67 % dari target 93 % sedangkan untuk

indikator SAKIP Kecamatan Patebon tercapai 70,05 % dengan target sebesar 75 %.

Apabila dilihat dari skala penilaian tingkat Capaian Kinerja di Kecamatan Patebon sudah dalam kategori baik halini menggambarkan bahwa pelayanan maupun kinerja di Kecamatan Patebon sudah dijalankan dengan baik meskipun belum optimal hasilnya.

2. *Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun lalu*

Tabel 3.3
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2024 dengan Tahun lalu (2022 dan 2023)

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator/ Kinerja	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan masyarakat	91	90	112	92	91	113	93	84,67	85,7
		Nilai SAKIP Kecamatan	70	70,1	72	74	70,40	99,86	75	70,05	94

Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan Perencanaan Pembangunan Nasional maupun regional.Oleh karena itu tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan analisis terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya.Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik didaerah regional maupun tingkat nasional.

Dengan melihat tabel diatas dapat dijelaskan bahwa :

- 1. Perbandingan Realisasi Kinerja :
 - a. Pada Indikator IKM :

Pada Tahun 2024 dengan tahun lalu mengalami penurunan hal ini terjadi karena target yang terlalu tinggi.Namun secara umum bahwasanya pelayanan di Kecamatan Patebon sudah terlayani dengan baik hal ini dapat dibuktikan dengan pelayanan sesuai dengan SOP dan perlu diketahui bahwa peningkatan capaian kepuasan masyarakat di Kecamatan

Patebon jumlahnya tidak selalu linier.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja pada SAKIP :

Perbandingan realisasi Kinerja SAKIP ditahun 2024 dengan tahun sebelumnya selalu mengalami peningkatan dan ini merupakan tujuan utama dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan. Ini menunjukkan adanya perbaikan terus menerus pada kinerja organisasi

2. Perbandingan Capaian Kinerja

a. Pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

Perbandingan capaian dalam IKM pada tahun 2024 dan tahun lalu selalu mengalami peningkatan hal ini membuktikan bahwa sasaran strategis kita untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam IKM sudah memberikan pelayanan prima bagi warga Kecamatan Patebon

b. Pada Indikator SAKIP

Perbandingan capaian kinerja dalam SAKIP mengalami penurunan ditahun 2024 dibanding pada tahun sebelumnya. Salah satu sebab penurunan penilaian dalam SAKIP adalah dikarenakan penyusunan dalam membuat target yang tidak realistis. Salah satu faktor tidak terpenuhinya target dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) adalah dengan tidaknya memperhitungkan faktor – faktor khususnya eksternal yang tidak terduga khususnya dalam sarana dan prasarana juga faktor lainnya sehingga mengakibatkan tidak tercapainya target tersebut.

3. *Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategi organisasi*

.IKM merupakan sebuah ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan dikecamatan Patebon. Dari uraian tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat memiliki tingkat kemajuan meskipun dengan jumlah tersebut diatas dapat diindikasikan tidak ada masalah dalam pelayanan kepada masyarakat namun ini masih diperlukan evaluasi dan perbaikan.

Sedangkan pada capaian kinerja pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (SAKIP) juga sudah dalam kategori yang baik namun dengan melihat target dari Rencana Strategis angka tersebut masih sangat terlalu rendah hal ini yang menjadi bumerang karena dengan jumlah target yang terlalu tinggi.

Terhadap capaian realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 84,67 % dibandingkan dengan capaian 2023 sebesar 91 % maka dapat dijelaskan bahwa pelayanan yang dilaksanakan oleh kecamatan masih perlu ditingkatkan dan baik kualitas maupun kuantitasnya sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan dan tujuan pelayanan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Beberapa faktor pendorong/penghambat untuk pencapaian target kinerja yaitu

Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja

1. Komitmen Pimpinan

- Kepemimpinan yang kuat dan komitmen yang tinggi dari pimpinan akan menjadi motivasi bagi seluruh pegawai untuk mencapai target kinerja

2. Sumber Daya yang Memadai

- Ketersediaan sumber daya yang cukup, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana, sangat penting untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan

3. Sistem Pengendalian Intern yang Efektif

- Sistem pengendalian intern yang baik akan membantu mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana

4. Peningkatan Kapasitas Pegawai

- Pelatihan dan pengembangan kapasitas pegawai secara berkelanjutan akan meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab

5. Koordinasi dan Kolaborasi

- Kerjasama yang baik

6. Pemanfaatan Teknologi Informasi

- Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

1. Kurangnya Komitmen Pimpinan
Ketidakkonsistenan dalam memberikan dukungan dan arahan dari pimpinan dapat menghambat pencapaian target kinerja
2. Keterbatasan Sumber daya
Keterbatasan anggaran, tenaga kerja, sarana dan prasarana menjadi kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan
3. Birokrasi yang Rumit
Prosedur birokrasi yang terlalu rumit dan berbelit – belit menjadikan hambatan efektifitas pelaksanaan program
4. Kurangnya koordinasi dan Kolaborasi
Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar pimpinan dan bawahan menyebabkan tumpang tindih tugas dan tanggung jawab
5. Perubahan Kebijakan
Kebijakan yang sering berubah - ubah sehingga mengganggu stabilitas dan kontribusi program
7. Faktor Eksternal
Faktor ini dapat berupa seperti bencana alam, perubahan kondisi ekonomi atau pandemi sehingga dapat mengganggu pelaksanaan program dan kegiatan
8. Kurangnya Keterampilan dan Pengetahuan
Kekurangan pelatihan atau pengalaman dapat menghalangi individu dalam menyelesaikan tugas dengan efektif dan efisien.
9. Tugas yang Tidak Jelas atau Terlalu Berat
Ketidakjelasan dalam tugas atau tujuan yang terlalu berat tanpa dukungan yang memadai dapat menghambat pencapaian kinerja.
10. Kurangnya Penghargaan dan Pengakuan
Ketika pencapaian tidak dihargai atau diakui, individu atau tim akan kehilangan semangat untuk bekerja lebih baik.
11. Perubahan yang Tidak Terencana atau Tiba-tiba
Perubahan yang tidak terencana atau terjadi secara mendadak dapat mengganggu fokus dan menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan tugas.

Dengan beberapa inovasi/terobosan yang telah dilakukan Kecamatan Patebon dalam pencapaian target kinerja tahun 2024 berupa Realisasi APBD sebesar 93,02%.

Dengan *tercapai tercapainya**) target tahun 2024 sebesar 93.02% maka beberapa strategi yang telah dan akan dilakukan untuk pencapaian kinerja yaitu :

1. Penguatan Sistem Perencanaan
Menyusun perencanaan yang realistis, terukur, dan berbasis data
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas pegawai secara berkelanjutan serta Program Pengembangan Karir adalah memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengikuti kursus, seminar, atau pendidikan lanjutan guna mendalami bidang kerja mereka.
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi
Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja seperti AI, big data, dan otomatisasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengumpulan, analisis, dan pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan.
4. Peningkatan Partisipasi Stakeholder
Melibatkan seluruh stakeholder dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.
5. Evaluasi berkala
Melakukan evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi
6. Peningkatan Akuntabilitas
Meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui mekanisme pengawasandan pengendalian yang efektif.
7. Pemberian Tujuan yang Jelas dan Terukur (SMART)
Sasaran Spesifik: Menetapkan tujuan yang jelas dan terukur, yang memotivasi individu untuk bekerja keras mencapainya.
8. Penerapan Teknologi dan Inovasi
 - Digitalisasi Proses Kerja: Mengadopsi teknologi terbaru untuk menyederhanakan tugas dan meningkatkan efisiensi.
 - Automatisasi: Menggunakan alat otomatis untuk proses yang berulang dan menghemat waktu, memungkinkan karyawan untuk fokus pada tugas yang lebih strategis.
9. Peningkatan Kepemimpinan dan Manajerial

- Pelatihan Kepemimpinan: Mengembangkan keterampilan kepemimpinan melalui pelatihan agar pemimpin bisa lebih efektif dalam mengarahkan tim.
- Pendekatan Kepemimpinan Kolaboratif: Memberikan ruang bagi anggota tim untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan memberikan masukan.

10. Meningkatkan Komunikasi Internal

- Rapat Tim Rutin: Mengadakan pertemuan secara teratur untuk memfasilitasi komunikasi antara atasan dan bawahan serta antar anggota tim.
- Feedback Terbuka: Mendorong budaya memberikan dan menerima umpan balik konstruktif untuk meningkatkan kinerja.

11. Penilaian dan Penghargaan Kinerja

- Sistem Penilaian Kinerja: Menerapkan sistem evaluasi kinerja yang objektif dan transparan, serta memberikan umpan balik yang membangun.
- Penghargaan dan Insentif: Memberikan insentif finansial maupun non-finansial (seperti penghargaan karyawan terbaik, liburan, dll.) untuk meningkatkan motivasi.

Strategi yang Akan Dilakukan untuk Pencapaian Kinerja

1. Transformasi Budaya Kerja

- Kebudayaan Organisasi yang Mendukung Inovasi: Membangun budaya yang mendukung kreativitas, kolaborasi, dan berbagi pengetahuan antar karyawan.
- Penghargaan atas Kreativitas: Menciptakan penghargaan atau insentif bagi individu yang memberikan ide baru atau solusi inovatif.

2. Penggunaan Teknologi Canggih untuk Analisis Kinerja

- Big Data dan AI: Menggunakan analitik berbasis data dan kecerdasan buatan (AI) untuk melacak dan menganalisis kinerja secara real-time.
- Dashboard Kinerja Digital: Mengembangkan platform untuk memantau pencapaian kinerja secara lebih transparan dan akurat.

3. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan

- Program Kesehatan Mental: Menyediakan dukungan bagi karyawan dalam hal kesehatan mental dan keseimbangan kehidupan kerja.

- **Fleksibilitas Kerja:** Memberikan kebijakan kerja fleksibel (seperti bekerja dari rumah atau jam kerja fleksibel) untuk mendukung kesejahteraan dan produktivitas karyawan.
4. **Peningkatan Kolaborasi dan Kerja Tim**
- **Cross-Functional Teams:** Membentuk tim lintas fungsi untuk menyelesaikan proyek dengan berbagai perspektif dan keahlian.
 - **Kolaborasi Virtual:** Meningkatkan penggunaan platform kolaborasi daring untuk memastikan komunikasi dan koordinasi tetap berjalan lancar, meski dalam situasi kerja jarak jauh.
5. **Penyusunan Rencana Pengembangan Organisasi**
- **Strategi Jangka Panjang:** Merancang dan menyusun strategi organisasi yang berfokus pada pertumbuhan berkelanjutan dan adaptasi terhadap perubahan pasar dan teknologi.
 - **Inovasi Berkelanjutan:** Menumbuhkan mindset inovasi di semua level organisasi untuk memastikan daya saing dan peningkatan kinerja.
6. **Analisis SWOT**
- Melakukan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman ¹ organisasi.

4. *Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional*

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Realisasi 2021	Standart Nasional	% capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM	90,28	-	-
		Nilai SAKIP Kecamatan	69,15	-	-

5. *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan*

Tabel 3.5
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

No	Tujuan/Sa saran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
----	--------------------	----------------------	--------	-----------	--------------	--	-----------------------

1	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM	93 %	84,67	85, 7	- Kualitas pelayanan yang menurun yang dikarenakan fasilitas yang kurang memadai - Kurangnya SDM yang memadai dikarenakan sering ada mutasi - Kurang responsif pegawai dalam pelayanan - Kurangnya evaluasi kinerja	- Dengan peningkatan fasilitas yaitu dengan memperbaiki fasilitas yang ada dan menambah fasilitas yang diperlukan - Melakukan pelatihan bagi petugas untuk meningkatkan pelayanan - Dengan membuka akses pelayanan dalam informasi publik - Melakukan evaluasi secara berkala dan serta mengidentifikasi masalah yang ada serta mencari solusi agar pelayanan dapat secara maksimal
		Nilai SAKIP Kecama tan	75	70,05	94	- Kepemimpinan Ketidakkonsisten an dalam memberikan dukungan dan arahan dari pimpinan dapat menghambat pencapaian target kinerja - Keterbatasan anggaran, tenaga kerja, sarana dan prasarana menjadi kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan	- Kepemimpinan yang kuat dan komitmen yang tinggi dari pimpinan akan menjadi motivasi bagi seluruh pegawai untuk mencapai target kinerja - Melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas pegawai secara berkelanjutan dan terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang seperti Komputer/pc, meja kursi yang memadai dll

						- Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar pimpinan dan bawahan menyebabkan tumpang tindih tugas dan tanggung jawab - Kelemahan dalam perencanaan yang dikarenakan membuat target yang tidak realistis serta faktor SDM yang kurang memadai - Kurangnya koordinasi koordinasi bersama unit kerja, stakeholder dan lembaga terkait yang dilakukan sehingga menimbulkan pandangan yang tidak sinergis - Fokus yang berlebihan pada Output (kuantitas) buka pada kualitas sehinga hasil program dan kegiatan tidak berhasil sesuai target yang ditentukan	- Dengan meningkatkan komunikasi dengan mengadakan rapat secara rutin dan berkala - Harus memahami antara tujuan strategis dengan indikator yang ada sehingga program dan kegiatan dalam terlaksana sesuai dengan target yang ditentukan serta melakukan pelatihan dan kopetensi bagiseluruh pegawai - Menjalin kerjasama anatr lembaga dan stakeholder dengan menjalin komunikasi yang efektif sehingga terjalin kerjasama untuk mencapai tujuan - Mengindentifikasi outcome yang ada yang terukur yang ingin dicapai secara spesifik, terukur, relevan, dan berjangka waktu (SMART) dengan menerapkan pendekatan berbasis data serta melakukan evaluasi secara berkala
--	--	--	--	--	--	---	---

6 *Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangkapencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah*

Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Dana

Sumber dana yang dialokasikan untuk Pemerintah Kecamatan Patebon setelah perubahan adalah sebesar Rp 2.665.694.385,- yang terdiri dari Belanja langsung sebesar Rp2.107.049.385 belanja tidak langsung sebesar Rp 558.645.000

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintah Umum dengan jumlah anggaran Rp 3.850.000.00,kemudian realisasi anggaran sebesar Rp 3.850.000.00 (100 %)
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan jumlah anggaran Rp 132.214.000,kemudian realisasi anggaran sebesar Rp 129.511.552,00 (97,96 %)
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan jumlah anggaran Rp 56.920.000,00 kemudian realisasi sebesar Rp 55.885.000,00 (97,48 %)
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan jumlah anggaran sebesar Rp 55.114.000,00 kemudian realisasi 51.412.500,00 (93,28)
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan jumlah anggaran Rp 2.417.596.385,00 kemudian realisasi sebesar R 2.267.439.838,00 (93,79 %)

Kebijakan efisiensi penggunaan sumber dana yang ditetapkan oleh Pemerintah Kecamatan Patebon dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dirumuskan sebagai berikut :

1. Memberdayakan potensi sumber daya manusia yang ada dengan menerapkan seluruh aturan perundang-undangan guna menciptakan tertib hukum administrasi sebagai langkah menuju terciptanyapemerintahan yang Good Governance ;
2. Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan dan Pemerintah Desa;
3. Meningkatkan kredibilitas kinerja aparatur melalui peningkatan kualitas kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Pencapaian kinerja secara maksimal sesuai standart pemenuhan SOP;
5. Mengupayakan kerjasama dengan Dinas Instransi terkait dan Lembaga Pendidikan, Kesehatan dan Agama untuk peningkatan SDM

- masyarakat;
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan
 7. Melaksanakan efesiensi pembiayaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan organisasi kecamatan
 8. Peningkatan pengembangan usaha produktif melalui program pelatihan ketrampilan dengan membuka peluang usaha bagi masyarakat

Tabel 3.6
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	93	84,7		559.913.095	422.786.362		
		75	70,05		2.105.781.290	2.084.912.362		

7.Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan Kinerja adalah melalui 6 program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2024 Program tersebut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Tabel 3.9
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Nilai IKM	97,96	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Prosentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	97,96	Sangat tinggi

	kecamatan		97,48	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	97,48	Sangat tinggi
			97,48	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase Keamanan dan Ketetapan Umu	97,48	Sangat tinggi
			100	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	100	Sangat tinggi
		Nilai SAKIP	93,28	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah	93,28	Sangat tinggi

Kinerja Program pada Kecamatan Patebon dengan jumlah 25 indikator kinerja dengan tingkat ketercapaiannya sebesar 94.07persen. Kinerja program ini didukung oleh kegiatan sebanyak 11 dengan indikator sebanyak 20 indikator, dengan rata-rata tingkat ketercapaian seluruh indikator kegiatan sebesar 90 persen. Dari rata-rata tingkat ketercapaian kinerja program dan kegiatan tersebut, maka dapat diketahui tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan sebesar 90 persen, dan termasuk dalam kategori tingkat kesesuaian *Tinggi*.

Tingkat kesesuaian antara kinerja program dengan kegiatan dinilai Tinggi,yang artinya kegiatan yang dilakukansudah tepat dalam mendukung kinerja program. Namun di tahun depan perlu strategi lain untuk mendorong ketercapaian kinerja program, mengingat kinerja program pada tahun depan adalah untuk mendukung ketercapaian indicator sasaran dan program RPJMD serta indikator kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Renstra ada tambahan indikator-indikator baru, serta dalam rangka pencapaian target penyelenggaraan urusan kewenangan kewenangan yang menjadi kewenangan OPD Kecamatan Patebon sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku baik peraturan kementerian/ Lembaga teknis maupun kementerian dalam negeri, agar lebih optimal dengan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

1. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Dari uraian diatas dapat diidentifikasi permasalahan yang ditemui dalam pencapaian kinerja pada Tahun anggaran 2024 adalah bahwa dalam pencapaian kinerja antara outcome dan output masih belum seimbang. Penyebab factor ketidakseimbangan ini diantaranya adalah :

1. Fokus yang berlebihan pada Output

Bahwa OPD pada Kecamatan Patebon masih seringkali terpaku pada kuantitas kegiatan yang dilakukan daripada kualitas hasil yang dicapai hal ini berakibat banyak program dan kegiatan yang tidak efektif dan tidak efisien

2. Kurangnya Pengukuran Outcome

Tidak hanya indicator yang jelas dan terukur untuk mengukur dampak jangka panjang dari suatu program atau kegiatan

3. Kelemahan dalam Perencanaan

Perencanaan yang tidak matang dan tidak realistis, sehingga sulit untuk mencapai hasil yang diharapkan

4. Kurangnya Koordinasi

Kurangnya koordinasi bersama unit kerja, stakeholder dan lembaga terkait yang dilakukan sehingga menimbulkan pandangan yang tidak sinergis

5. Faktor Eksternal

Kondisi lingkungan yang tidak kondusif, seperti perubahan kebijakan, bencana alam, atau kondisi ekonomi yang tidak stabil.

b. Solusi

Untuk mengatasi masalah ini, beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan adalah :

1. Mendefinisikan Outcome yang Jelas

Menentukan *outcome* yang ingin dicapai secara spesifik, terukur, relevan, dan berjangka waktu (SMART)

2. Membangun Indikator Outcome

Mengembangkan indikator yang dapat mengukur sejauh mana *outcome* telah tercapai.

3. Mengalokasikan Sumber Daya Secara Efektif

Memprioritaskan kegiatan yang paling efektif untuk mencapai *outcome* yang diinginkan

4. Meningkatkan Kolaborasi
Jalin kerjasama antar unit kerja dan pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama.
5. Melakukan Evaluasi Berkala
Melakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur kemajuan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan
6. Fokus pada Proses
Selain mengukur hasil akhir, juga perlu memperhatikan proses yang dilakukan. Apakah proses tersebut sudah efektif dan efisien
7. Menerapkan Pendekatan Berbasis Data
Gunakan data untuk membuat keputusan yang lebih baik dan mengukur dampak dari berbagai program dan kegiatan.
8. Meningkatkan Sumber Data Manusia
Memberdayakan potensi sumber daya manusia yang ada dengan menerapkan seluruh aturan perundang-undangan guna menciptakan tertib hukum administrasi sebagai langkah menuju terciptanya pemerintahan yang Good Governance ;
9. Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan dan Pemerintah Desa
Kinerja aparatur yang baik adalah kunci keberhasilan pembangunan desa. Aparatur yang kompeten, berdedikasi, dan responsif akan mampu meningkatkan pelayanan publik, mendorong partisipasi masyarakat, mengelola anggaran desa secara efektif dan menciptakan pemerintahan desa yang bersih dan transparan
10. Meningkatkan kredibilitas kinerja aparatur melalui peningkatan kualitas kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku;
11. Pencapaian kinerja secara maksimal sesuai standart pemenuhan SOP;
12. Mengupayakan kerjasama dengan Dinas Instransi terkait dan Lembaga Pendidikan, Kesehatan dan Agama untuk peningkatan SDM masyarakat;
13. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan
14. Melaksanakan efesiensi pembiayaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan organisasi kecamatan
15. Peningkatan pengembangan usaha produktif melalui program pelatihan ketrampilan dengan membuka peluang usaha bagi masyarakat

B. Realisasi Anggaran

Kecamatan Patebon melaksanakan urusan pemerintahan unsur kewilayahan dengan jumlah pagu Tahun anggaran 2024 sebesar Rp 2.665.694.385 dan terealisasi sebesar Rp 2507.698.890 atau 94,07 % dan realisasi fisik sebesar 94,07 % yang terdiri dari 5 Program dan 11 kegiatan.

Capaian kinerja program dan kegiatan secara rinci dituangkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.10
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pada Kecamatan Patebon
Tahun anggaran 2024

NO		Uraian Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota			
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	0	0	
	2	Administrasi keuangan perangkat daerah	2.105.689.385	1.995.102.610	94,75
	3	Administrasi umum perangkat daerah	91.601500	89.809.752	98,04
	5	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	207.225.500	171.563.976	82,79
	6	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	13.080.000	10.963.500	83,82
		Program penyelenggaraan Pemerintahan & Pelayanan Publik			
	1	Pelaksanaan urusan	22.314.000	19.765.000	88,58

		pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat			
	2	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14.500.000	14.500.000	100
	3	Koordinasi Pemeliharaan sarana dan prasarana Pelayanan Umum	95.400.000	95.246.552	99,84
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Kelurahan			
	1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	56.920.000	55.485.000	
		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum			
	1	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	3.850.000	3.850.000	97,48
		Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			
	1	Fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	55.114.000	55.114.000	93,28

Dari tabel diatas dapat diuraikan beberapa hal terkait pencapaian program dan kegiatan tahun 2024.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 5 Kegiatan. Target kinerja yang tercapai adalah 4 kegiatan, untuk anggaran dalam perencanaan tidak dapat dilaksanakan karena pada perubahan anggaran ditiadakanProgram Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terdiri dari 3 Kegiatan. Target kinerja yang tercapai 3 kegiatan tercapai semua.

- 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terdiri dari 1 Kegiatan. Target kinerja yang tercapai adalah 1 kegiatan target tercapai semua.
- 3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terdiri dari 1 Kegiatan. Target kinerja yang tercapai adalah 1 kegiatan target tercapai semua.
- 4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terdiri dari 1 Kegiatan. Target kinerja yang tercapai 1 kegiatan tercapai semua

C. Penghargaan

Pada tahun 2024 penghargaan yang didapat pada Kecamatan Patebon adalah sebagai Kecamatan Terbaik 1 dalam Pengawasan Kearsipan Internal di Tingkat Kabupaten.

Adapun perolehan nilai yang didapat dalam pengawasan adalah 83,17 (*delapan puluh tujuh koma satu tujuh*) dengan Predikat A (memuaskan)



BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Patebon Tahun 2024 ini merupakan wujud dari rasa tanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan – kegiatan pemerintahan,pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik kepada Bupati Kendal.

Berdasarkan Visi,Misi, cara pencapaian tujuan ,sasaran dan realisasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah tertuang diperjanjian kinerja Tahun 2024.Adapun dalam pelaksanaan program dan kegiatan ini terdapat beberapa permasalahan yang kita identifikasi adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan.
2. Kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan dan keuangan baik secara kuantitas maupun kualitas
3. Masih belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan,monitoring dan evaluasi pembangunan.
4. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan,sehingga masih adanya kesulitan merealisasi sasaran program dan menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektifitas program/kegiatan
5. Belum optimalnya pegawai yang menduduki jabatan, Sub Bagian maupun Seksi dalam pelaksanaan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

2. REKOMENDASI

Meskipun dalam permasalahan dan hambatan sudah dapat teratasi namun dalam pelaksanaannya tugas dan fungsi pemerintahan,pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat masih jauh dari hasil maksimal dan perlu dilakukan pembenahan –pembenahan yaitu :

1. Dengan menguatkan komitmen dan kerjasama dalam manajemen internal organisasi dilingkungan Kecamatan Patebon dalam

- melaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan
2. Penambahan dan pembenahan sarana dan prasarana kerja berupa ruang kerja yang memadai, peralatan kantor yang mencukupi serta perlengkapan lainnya dalam menunjang kegiatan.
 3. Penempatan pegawai yang sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki dengan menyesuaikan tugas dan bidang masing-masing
 4. Diadakan koordinasi secara rutin, pengawasan, evaluasi dan juga pelaporan dalam pelaksanaan tugas.
 5. Adanya penambahan anggaran untuk menunjang kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan.

Demikian Laparak Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Patebon Tahun 2024 ini dibuat dengan maksud untuk memberikan gambaran secara jelas kegiatan yang sudah dan belum dilakukan sehingga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja aparat pemerintahan Kecamatan Patebon dimasa yang akan datang.

Patebon, 31 Januari 2025

KAMAL PATEBON

ABDUL MUFID, SH. MM

NIP. 1976810141992031001